

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian ini, penting untuk meninjau terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu dilakukan, dan menemukan landasan teori yang kuat dalam analisis penerapan *good corporate governance* pada perusahaan kontraktor BUMN.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	<i>The Impact of Good Corporate Governance on the Sustainability Performance of Construction Companies.</i> Paul dan Addas (2018)	Menganalisis pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan konstruksi.	Kualitatif dan kuantitatif	Penerapan pengaruh <i>good corporate governance</i> dapat berkontribusi pada praktik bisnis yang lebih berkelanjutan di sektor konstruksi	Persamaan: metode penelitian perbedaan: tahun penelitian

2	Evaluasi dan Implementasi GCG BUMN Menggunakan Model Peratingan CGCG UGM. Petista dan Kusuma (2019)	Mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG pada PT PP (Persero) Tbk dengan menggunakan model peratingan Center for <i>Good Corporate Governance</i> (CGCG UGM).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PP (Persero) Tbk mendapatkan skor A+ dengan total nilai 3557. Hasil skor "A+" berada pada posisi 3 dari 16 ranking yang ada di CGCG UGM sehingga penerapan GCG pada PT PP (Persero) Tbk dinilai sudah baik namun belum optimal.	Persamaan: Metode Penelitian Perbedaan: Tempat dan tahun penelitian
---	---	--	------------	---	--

3	Analisis pengaruh implementasi <i>good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan (Rohman fadlul, abdi kharisa, adwiyah hasibuan riska, nasution, julianan, 2023)	Memahami dampak penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap perusahaan	Kualitatif	1) Bahasa Indonesia Kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 2) kepemilikan institusional berpengaruh positif dan negatif terhadap nilai perusahaan. 3) komite audit mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap nilai perusahaan 4) proporsi direktur independen berpengaruh sangat positif terhadap nilai perusahaan. 5) auditor eksternal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik antara lain prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kewajaran tanggung jawab dan independensi, kepastian dan independensi pada PT Bank Sulut Go Manado telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat -Bisnis. Undang-Undang Nomor “PER-01/MBU/2011	Persamaan: metode penelitian Perbedaan: tahun dan tempat penelitian
---	--	---	------------	---	---

4	Analisis penerapan <i>good corporate governance</i> pada PT. Bank Sulutgo, manado (M. Kapojos peter, b nangoi grace, a.c madika julio, 2021)	Analisis dan kajian penerapan prinsip manajemen yang baik pada pt bank salutgo manado apakah dimanfaatkan benar sesuai dengan kebijakan bisnis Nomor Menteri Negara: Per-01/MBU/2011	Kualitatif	Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik antara lain prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kewajaran tanggung jawab dan independensi, kepastian dan independensi pada PT Bank Sulut Go Manado telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat -Bisnis. Undang-Undang Nomor “PER-01/MBU/2011	Persamaan: Metode Penelitian Perbedaan: Tahun dan tempat penelitian
---	---	---	------------	--	---

5	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Desak et all (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>good corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan yang masuk pemeringkatan <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI).	Kuantitatif	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROI). <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROI). <i>Good corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROI) pada perusahaan yang masuk pemeringkatan <i>Corporate Governance Perception Index</i> sebesar 47,3%.	Persamaan : Metode penelitian Perbedaan : Tempat dan tahun penelitian
---	---	--	-------------	--	---

6	Corporate Governance and Firm Performance in Developing Countries: Evidence from State-Owned Enterprises. Askhita dan Chandan (2016)	Menganalisis hubungan antara penerapan GCG dan kinerja perusahaan di negara berkembang, dengan fokus pada BUMN.	Kuantitatif	Dewan yang lebih besar dikaitkan dengan pengetahuan intelektual yang lebih mendalam, yang membantu dalam meningkatkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Return on equity dan profitabilitas tidak berhubungan dengan indikator tata kelola perusahaan. Dualitas CEO tidak terkait dengan ukuran kinerja perusahaan apa pun untuk perusahaan sampel.	Persamaan: Metode penelitian Perbedaan : Tahun dan tempat penelitian
7	Pengaruh Implementasi GCG terhadap Kinerja Keuangan BUMN Konstruksi di Indonesia Ahmad, M (2020)	Menganalisis hubungan antara penerapan GCG dan kinerja keuangan BUMN konstruksi.	Kualitatif	Terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerapan GCG dan kinerja keuangan.	Persamaan: metode penelitian Perbedaan: tahun dan tempat penelitian
8	Analisis Implementasi Prinsip GCG pada Proyek Infrastruktur BUMN Dewi, A.S (2018)	Menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG pada proyek infrastruktur yang dilakukan BUMN.	Kualitataif	Terdapat beberapa prinsip GCG yang belum sepenuhnya diterapkan.	Persamaan: Metode penelitian Perbedaan: tahun dan tempat penelitian

Sumber : Data diolah penulis.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Analisa

Menurut Wiradi (Hadiyanto dan Makinuddin, 2006), analisis yaitu aktivitas yang nantinya akan membuahkan seperti pembeda kemudian menyusun unsur-unsur yang akan dikelompokkan berdasarkan *standart* tertentu.

Analisis menurut Komaruddin (2002) adalah kegiatan berpikir untuk memecah keseluruhan menjadi bagian-bagian untuk mengenali tanda-tanda bagian-bagian tersebut, hubungan antara bagian-bagian tersebut dan tujuan setiap bagian dalam kesatuan tubuh. Metode mengamati sesuatu dengan cara menyusun, menguraikan, membedakan dan mengelompokkan menurut standar tertentu untuk menemukan informasi yang faktual.

2.2.2 Implementasi

Menurut Mulyadi, (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Aktivitas ini bertujuan untuk merubah ketntuan tersebut tetap berpegang pada rutinitas dan cobalah untuk mencapai perubahan besar atau kecil sesuai rencana. Implementasi merupakan upaya untuk memahami yang seharusnya dilakukan setelah implementasi.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses praktik manajemen umum yang dapat dipelajari pada tingkat

organisasi tertentu. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan individu/pejabat pemerintah atau organisasi pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk perintah khusus atau keputusan eksekutif atau pengadilan lain.. Implementasi dapat dianggap sebagai suatu kegiatan dari suatu rencana yang dijabarkan secara jelas dan tepat. Implementasi biasanya dilakukan setelah rancangan dianggap matang.

Hanifah Harsono mengemukakan dalam bukunya yaitu pandangannya mengenai implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah cara penerapan strategi kebijakan kedalam tindakan strategis, mulai dari kebijakan hingga manajemen. Menyusun strategi perbaikan program menjelaskan implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, kita dapat mengatakan bahwa implementasi adalah strategi mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang baik, berdasarkan seberapa baik pendekatan perbaikan akhir setiap program berjalan untuk mencapai tujuan implementasi yang dimaksudkan.

Implementasi juga disebut sebagai melakukan atau menggunakan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), menyarankan implementasi sebagai percobaan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) menyatakan hal tersebut inisiasi adalah perpanjangan

dari kegiatan yang saling melengkapi. Memahami penggunaan sebagai fungsi yang konsisten satu sama lain. Kata McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Berdasarkan Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengatakan demikian operasi adalah proses teknis.

2.2.3 *Good Corporate Governance*

Teori-teori yang berhubungan dengan *good corporate governance* adalah teori *agency* dan teori *stakeholder*. *Stakeholder* adalah partisipan atau beberapa kelompok orang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan yang memberikan *impact* atau terpengaruh oleh beberapa aktivitas bisnis secara global. *Stakeholder* terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal.

Warsono, Amalia, dan Rahajeng (2009) juga menjadikan poin utama teori *stakeholder* yaitu perbedaan tujuan *prinsiple* dan agen dapat menimbulkan masalah disebabkan karir manajer bisnis diarahkan pada urusan pribadi.

Freeman, Wick dan Pharrmar (2004) berpendapat bahwa manajer harus meningkatkan *engagement*, menciptakan inspirasi dan menciptakan jaringan dengan stakeholder-nya, dimana setiap anggota berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.

Warsono, Amalia, dan Rahajeng (2009) menjelaskan teori pemangku kepentingan didasarkan pada kenyataan bahwa bisnis telah menjadi sangat besar dan korporasi telah menjadi sangat umum.

Perusahaan harus bertanggung jawab kepada berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya kepada pemegang saham.

dalam pedoman umum *good corporate governance* di Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dinyatakan bahwa keanggotaan yang terlibat dalam kepengurusan perserian terbatas swasta di Indonesia mempunyai sistem dua dewan, yaitu dewan pengawas dan pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, penerapan *good corporate governance* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyusun beberapa pedoman mengenai penerapan *good corporate governance* di sektor jasa keuangan. Namun di Indonesia, tentunya masih banyak perusahaan yang belum menggunakan dan menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Forum tentang Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI) tahun 2001 menyempurnakan alat penilaian kualitas tata kelola perusahaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar di Indonesia tanpa memeriksa sektor-sektor yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Pertanyaan dalam daftar penilaian mandiri tata kelola perusahaan

mencakup lima topik, yaitu hak pemegang saham, kebijakan tata kelola, praktik tata kelola perusahaan, keterbukaan informasi, dan audit.

Dalam penelitian (Brigham dan Erhardt, 2005), *good corporate governance* dijelaskan bahwa sebagian perangkat aturan mekanisme yang memastikan manajer menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut disebut dengan TARIF, khususnya *Transparency, Akuntability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*. Inti dari tata kelola perusahaan adalah untuk menentukan terwujudnya tujuan pemegang saham utama dalam pengelolaan aset.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan *good corporate governance* di Indonesia. Menurut KNGG, *good corporate governance* merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip etika yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan utama *good corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan dapat diprediksi, serta memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah peraturan yang mengatur *engagement* atau hubungan antara pihak-pihak yang sesuai dengan kewajibannya. *Good corporate governance* mencakup beberapa *stakeholder* yaitu pemegang saham,

pejabat, kreditor, serta pihak-pihak diluar perusahaan yang menjalankan sistem tersebut.

Penerapan *good corporate governance* dapat berlangsung secara tertata dan efektif, maka aktivitas perusahaan yang berjalan akan berkembang dengan baik, oleh karena itu beberapa hal yang berkesinambungan dengan kinerja suatu perusahaan maupun non keuangan juga akan semakin lebih baik (Brown dan Caylor, 2004).

Good corporate governance bersifat konsisten Peraturan Negara BUMN No. 117/2002, berbunyi: Peraturan digunakan oleh unit-unit BUMN untuk meningkatkan efisiensi usaha dan penilaian perusahaan untuk menentukan nilai pemegang saham dari waktu ke waktu jangka panjang dan juga memperhatikan kepentingan mitra lain, tergantung peraturan hukum dan etika.

Unsur internal *good corporate governance* mengacu pada faktor-faktor didalam perusahaan yang secara langsung mempengaruhi penerapan dan efektivitas *good corporate governance*. Unsur-unsur ini bersifat endogen dan berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Keberadaan pengawas disuatu perusahaan dapat menurunkan kebijakan kepada dewan direksi dan manajemen ketika menemui permasalahan. Komponen selanjutnya adalah direksi. Direksi adalah penghuni perusahaan yang bisa disebut dengan anggota perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan (Kuswiranto, 2016: 29). Sebagai

direktur suatu perseroan, direktur merupakan wakil perseroan sehingga tidak dapat bertindak seenaknya.

Komponen ketiga adalah komite audit. Komite audit perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendukung aktivitas auditor khususnya dalam memantau penerapan *good corporate governance* (Kuswiratmo, 2016: 75).

Unsur keempat adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan suatu instansi yang melakukan penanaman modal atau atas nama perusahaan (Setianto, 2016:41). Pengawasan akan menjadi lebih tinggi dan terkendali.

2.2.4 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menjadi landasan bagi perusahaan untuk beroperasi secara transparan dan objektif. Prinsip utama *good corporate governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Transparansi mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lengkap dan akurat kepada publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap organisasi bertanggung jawab atas tindakannya.

Komitmen terhadap *good corporate governance* berarti perusahaan harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Prinsip keadilan mengharuskan perusahaan memperlakukan seluruh *stakeholder* secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Independensi

memastikan keputusan strategis perusahaan diambil berdasarkan kepentingan jangka panjang perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Penerapan prinsip *good corporate governance* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan kepercayaan investor, mencegah korupsi, meningkatkan kinerja perusahaan, dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Dengan menerapkan *good corporate governance*, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, namun juga menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. *Good corporate governance* juga merupakan alat yang efektif untuk mengelola risiko dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Di era globalisasi saat ini, *good corporate governance* telah menjadi *standart* global yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global. Menurut Emirzon, Joni, (2006:95) Prinsip-prinsip utama *good corporate governance* itu penting dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Keterbukaan (*transparancy*), bisa diartikan terbuka informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menyajikan informasi material dan relevan tentang perusahaan. Informasi mengenai perusahaan dikomunikasikan secara terbuka, jujur, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan keuangan, kinerja perusahaan dan segala jenis informasi penting lainnya harus diungkapkan dengan jelas dan akurat. Penerjemahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam *good corporate governance*. Ketentuan ini mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan

informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan meliputi laporan keuangan, kinerja perusahaan, struktur properti, dan hal-hal lain yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terlibat. Melalui transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat (OECD, 2003).

Akuntabilitas (*accountability*), uraian pekerjaan, program, sistem dan akuntansi struktur perusahaan untuk pengelolaan perusahaan sudah dilakukan dengan baik. Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Terdapat sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Akuntabilitas artinya setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dewan direksi, pengurus dan manajer harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kepatuhan mencakup tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zarkasyi, 2008).

Tanggung jawab (*responsibility*), tanggung jawab perusahaan kepatuhan (*compliance*) dalam pengelolaan perusahaan prinsip bisnis dan prinsip hukum yang sehat aktif . Perusahaan bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan harus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Responsibility mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Perusahaan yang menggunakan *good corporate governance* harus berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Independensi (*independency*) adalah negara dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik manfaat atau yang tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip bisnis yang baik. Prinsip independensi mengharuskan perusahaan memperlakukan seluruh *stakeholder* secara jujur dan adil. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan selektif terhadap orang tertentu. Ekuitas melibatkan distribusi manfaat yang adil di antara *stakeholder*, karyawan, dan masyarakat (OECD, 2003).

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), yaitu perlakuan yang adil dan setara antar pihak untuk memenuhi hak-hak sekutu yang timbul dari kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan komisaris dan direksi harus independen dan tidak mengandung benturan kepentingan. Keputusan strategis perusahaan hendaknya diambil berdasarkan kepentingan jangka panjang perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Keberlanjutan berarti keputusan strategis perusahaan harus diambil berdasarkan kebutuhan jangka panjang perusahaan, bukan kepentingan individu atau kelompok. Direksi harus independen dan bebas dari benturan kepentingan.

2.2.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Dewan direksi adalah badan pengatur yang bertanggung jawab atas strategi bisnis dan sentral dalam proses kerja internal perusahaan. Direksi mempunyai peranan yang penting sebagai wakil dari pemegang saham. Direksi bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dan efektif, serta mematuhi semua peraturan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Direksi dan pemegang saham. Mereka juga harus terbuka terhadap pengawasan pihak ketiga, seperti auditor independen. Direksi harus mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambilnya. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk menerapkan strategi perusahaan.

Dewan Komisaris. Anggota direksi harus sangat independen dan bebas dari benturan kepentingan. Mereka harus berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki keterampilan yang relevan. Dewan komisaris melakukan *review* secara berkala terhadap kinerja direksi dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan komisaris juga mewakili kepentingan pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Komite yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite pada perusahaan. Tugas utama komite menurut OECD (2004) adalah :

- a) Meninjau serta memperbaiki strategi perusahaan, menetapkan *planning* aksi, kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis, menetapkan sasaran kinerja, memantau pelaksanaan dan pertunjukan. Memantau penggunaan modal, investasi, dan pembelian aset perusahaan.
- b) Meninjau sistem penentuan gaji direktur diposisi kunci dan anggota dewan, dan memastikan bahwa kontribusi direktur dengan transparan.
- c) Mengelola serta menyelesaikan beberapa konflik kepentingan manajemen, yang diantaranya adalah penyalahgunaan beberapa aset yang sudah diberikan perusahaan.
- d) Mengelola penerapan tata kelola perusahaan dan memodifikasinya jika perlu.
- e) Mengamati proses keterbukaan dan komunikasi yang baik di perusahaan (Hanas, 2009).

Komite audit merupakan komite independen yang bertugas memberikan nasihat kepada direksi mengenai masalah akuntansi, keuangan dan pelaporan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara akurat dan sesuai dengan *standart* akuntansi yang berlaku. Fungsi komite audit adalah sebagai berikut:

- a) Meninjau laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Ini termasuk laporan keuangan, perkiraan dan pelaporan keuangan lainnya. Meninjau apakah perusahaan sudah benar-benar menjalankan

aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan yang ada kaitannya dengan aktivitas perusahaan.

- b) Auditor internal meninjau kinerja audit.
- c) Menyampaikan kepada komisaris penerpaan manajemen resiko dan jenis resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan
- d) Meninjau dan menyampaikan kepada komite pengaduan tentang pengirim.
- e) Merahasiakan dokumen dan beberapa data perusahaan yang perlu dijaga.

2.2.6 Tujuan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan BUMN

Good corporate governance merupakan landasan penting bagi pengelolaan perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara. Penerapan *good corporate governance* di BUMN memiliki sejumlah tujuan strategis terkait. Tujuan utama *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*, BUMN diharapkan dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan yang baik dan akuntabilitas yang kuat akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa *good corporate governance* merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai kinerja perusahaan (Zarkasyi, 2008).

Good corporate governance mendorong perusahaan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Transparansi berarti perusahaan wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap organisasi bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan cara ini, risiko korupsi dan penyimpangan dapat dikurangi (OECD, 2003). Pemanfaatan *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Jika masyarakat yakin BUMN dikelola dengan baik dan prospektif, maka kepercayaan mereka terhadap perusahaan tersebut akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap reputasi perusahaan dan memperkuat posisi BUMN dimata masyarakat (jadibumn, 2023).

Good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan baik secara finansial maupun non finansial. Perusahaan yang dikelola dengan baik cenderung memiliki nilai pasar yang tinggi dan menarik minat investor. *Good corporate governance* dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan (OECD, 2003).

Good corporate governance dirancang untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan dalam perusahaan. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, kami berharap tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan dapat dikurangi.

Good corporate governance dapat meningkatkan independensi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan proses pengambilan keputusan yang transparan. BUMN dapat leluasa menentukan strategi bisnis

yang sesuai dengan kondisi pasar. *Good corporate governance* mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan usahanya. Dengan demikian, BUMN dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Penerapan *good corporate governance* sejalan dengan tren internasional mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Dengan menerapkan *good corporate governance*, BUMN dapat meningkatkan daya saingnya ditingkat internasional dan menarik investasi asing.

Saat ini, menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:40), tujuan *good corporate governance* adalah :

- a) Perusahaan menjalankan usaha dengan baik.
- b) Kegiatan perusahaan telah terlaksana.
- c) Tercapainya sasaran yang telah ditentukan.
- d) Aktivitas perusahaan dilaksanakan dengan transparan.

Terlaksana kebaikan sepenuhnya sebagai praktik tata kelola perusahaan yang mendorong perkembangan aktivitas perusahaan saat ini dan membawa nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tujuan *good corporate governance*, yaitu menerapkan sistem *good corporate governance* yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang, sekaligus melindungi pemegang saham dan direksi atau pejabat perusahaan. Meningkatkan kualitas hubungan antara *stakeholder*

dan manajemen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

2.2.7 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan praktik *good corporate governance* pada suatu perusahaan merupakan kegiatan penting yang memberikan manfaat bagi investor, pemerintah, dan masyarakat, serta dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39)

Praktik tata kelola perusahaan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Mengurangi biaya-biaya perusahaan selama ini, pemegang saham harus menanggung biaya akibat pemberian kekuasaan. Untuk mengelola biaya-biaya tersebut dapat berupa kerugian yang diderita oleh organisasi yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi, atau berupa biaya lanjutan yang harus ditanggung oleh perusahaan agar tidak muncul.
- b) Dengan mengurangi biaya modal, perusahaan yang baik dan sehat memberikan reputasi yang baik kepada peminjamnya. Cara tersebut berperan penting dalam mengurangi biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan pada saat mengajukan pembiayaan, serta dapat memperkuat kinerja keuangan dan meningkatkan daya saing produk perusahaan. Dengan mengembangkan nilai aset perusahaan, pengelolaan dan kesehatan perusahaan yang baik akan menarik investor untuk menginvestasikan uangnya.
- c) Meningkatkan nilai perusahaan dan citra perusahaan merupakan isu penting yang erat kaitannya dengan kinerja dan kehadiran perusahaan di masyarakat,

khususnya investor. Untuk meningkatkan citra perusahaan, terdapat kasus dimana *cost of money* terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan.

Tentu saja manfaat penerapan *good corporate governance* akan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan, dan manfaat *good corporate governance* dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ditengah persaingan internasional tidak hanya saat ini namun dalam jangka panjang. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam mengembangkan citra perusahaan dihadapan para investor, namun merupakan nilai tambah nyata bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya menghadapi persaingan usaha dalam dunia usaha yang kompetitif.

2.2.8 Implementasi *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan memerlukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Pemanfaatan *good corporate governance* tidak hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, namun juga sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Meskipun pentingnya *good corporate governance* telah diakui secara luas, namun penerapannya seringkali menghadapi banyak tantangan. Tantangan umum lainnya yang dihadapi adalah penolakan terhadap perubahan, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya *good corporate governance*, dan kurangnya sumber daya yang memadai. Perbedaan budaya organisasi dan

tingkat kompleksitas bisnis juga dapat menghambat proses penerapan *good corporate governance* (Zarkasyi, 2008).

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan ditentukan dengan komponen-komponen yang diperlukan berdasarkan analisis keadaan, metode dan tingkat persiapan perusahaan. Hal ini tentang memfasilitasi penerapan *good corporate governance* dan menerima dukungan dari berbagai kelompok perusahaan. Pada dasarnya menurut Chinn (2000) dan Shaw (2003) (Mawardi 2017: 102), perusahaan yang berhasil menerapkan *good corporate governance* menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tingkat penting pertama adalah pemahaman mendalam mengenai konsep *good corporate governance* oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah. Pemahaman ini mencakup dasar-dasar *good corporate governance*, manfaatnya, dan tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam penerapannya. Perusahaan juga perlu memahami proses efektif terkait *good corporate governance* di Indonesia.

Setelah memahami konsep *good corporate governance*, perusahaan perlu menganalisis keadaan saat ini. Analisis ini mencakup pemeriksaan terhadap struktur organisasi, sistem pengendalian internal, budaya perusahaan, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta peluang

dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam proses penerapan *good corporate governance*.

Berdasarkan hasil analisis, perusahaan dapat menyusun rencana penerapan *good corporate governance* secara komprehensif. Rencana ini mencakup tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus diambil, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Rencana implementasi harus mencakup alokasi sumber daya yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi.

Tahap persiapan dilakukan dengan 3 langkah utama, yaitu :

a) *Awareness building*

Menciptakan kesadaran merupakan langkah awal dalam menciptakan kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya tata kelola perusahaan dalam proses penerapannya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan konsultan independen diluar perusahaan. Jenis pekerjaan ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok atau kegiatan lain yang efektif dalam menghasilkan pengetahuan.

b) *Good Corporate Governance Assesment*

Menilai *good corporate governance* merupakan upaya untuk memahami keadaan *good corporate governance* suatu perusahaan saat ini. Pekerjaan ini penting untuk menentukan langkah awal penerapan *good corporate governance* dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan struktur dan struktur perusahaan yang aman untuk penerapan *good corporate governance*.

c) *Good Corporate Governance Manual Building*

Membuat buku tata kelola perusahaan yang tepat adalah langkah berikutnya. Berdasarkan hasil upaya kami untuk memahami tingkat organisasi dan pelaksanaan perusahaan, kami dapat mengembangkan manual atau prosedur untuk menerapkan pengelolaan perusahaan yang benar. Dapat dipersiapkan secara manual dengan bantuan konsultan khusus diluar perusahaan. Buku ini dapat dibagi menjadi buku untuk satu bagian perusahaan dan buku untuk seluruh anggota perusahaan, dan mencakup berbagai perspektif berikut.

Kebijakan *good corporate governance*, anggaran dasar, piagam komite audit, kebijakan penjelasan, kebijakan, kerangka manajemen risiko dan peta jalan untuk beberapa bagian perusahaan.

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan merumuskan manual tata kelola perusahaan, langkah selanjutnya adalah melanjutkan dan menerapkannya didalam perusahaan. Bagian ini terdiri dari tiga bagian utama, antara lain:

- a) Perlunya disampaikan kepada seluruh perusahaan mengenai perbedaan pendapat mengenai penerapan *good corporate governance*, khususnya pedoman penerapan manajemen bisnis yang baik. Asosiasi-asosiasi tersebut harus dikelola melalui suatu kelompok khusus yang telah dibentuk, sehingga

berada dibawah pengawasan langsung salah satu anggota dewan atau seorang manajer senior yang ditunjuk sebagai pembela *good corporate governance*. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan peta jalan yang telah disusun dan sesuai dengan pedoman praktik terbaik yang berlaku saat ini. Implementasinya adalah pendekatan *top-down* yang melibatkan komite perusahaan dan dewan direksi. Implementasinya juga harus mencakup aktivitas manajemen perubahan untuk memantau perubahan yang dihasilkan dari penerapan praktik manajemen perusahaan.

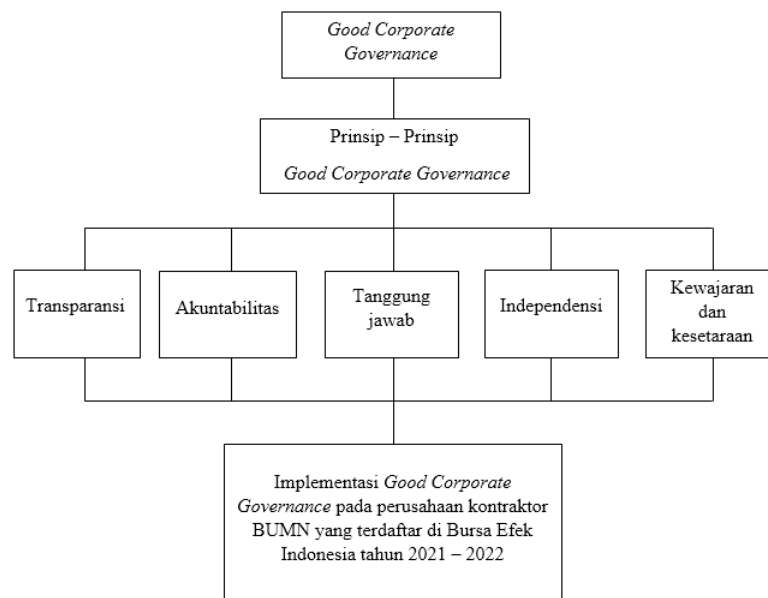
- b) Instalasi adalah fase implementasi yang panjang. Integrasi internal mencakup upaya untuk mendorong *good corporate governance* dalam seluruh praktik bisnis perusahaan dan berbagai undang-undang perusahaan. Kegiatan tersebut dapat menentukan bahwa penerapan *good corporate governance* tidak hanya sekedar struktur atau struktur permodalan saja, namun dapat dilihat pada seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Setelah penerapan *good corporate governance*, tahap evaluasi menjadi sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan *good corporate governance* telah berhasil dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini bersifat siklus dan berkesinambungan, sehingga perusahaan dapat terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* terus diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat yang sesuai bagi seluruh *stakeholder*.

Tahap evaluasi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk mengukur kelayakan *good corporate governance* telah diterapkan dengan meminta evaluasi pelaksanaan kepada lembaga swasta. Identifikasi praktik terbaik Anda saat ini. Ada banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa akuntansi tersebut, dan banyak juga perusahaan di Indonesia yang melakukan akuntansi. Evaluasi yang berupa evaluasi, juga dapat menentukan skor, misalnya mempengaruhi lingkungan BUMN. Penilaian tersebut dapat membantu perusahaan untuk menunjukkan kinerja perusahaan, serta metode dan tren penerapan praktik *good corporate governance* sehingga *insight* perusahaan dapat meningkatkan acuan yang diberikan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : KNKG dan data diolah penulis